

## RINGKASAN

**Sari  
Miranda  
180510189**

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA  
JARIMAH PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan  
Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd)  
(Muhammad Hatta, S.H., L.LM. dan Fauzah Nur Aksa,  
S.Ag., M.H)**

Kasus pemerkosaan di Aceh, khususnya di Meureudu, semakin meluas dengan korban utama, anak-anak di bawah umur. Kasus yang diangkat adalah pemerkosaan terhadap seorang perempuan berketerbelakangan mental oleh seorang pecandu film pornografi bernama Din Kohler. Kejadian terjadi selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Meureudu. Pelaku, Din Kohler, yang sudah bercerai, melampiaskan hasrat seksualnya yang menyimpang kepada korban. Kasus dilaporkan oleh ibu korban dan diteruskan ke kepolisian. Meskipun pelaku mencoba perdamaian, korban menolak, dan pelaku melarikan diri menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku akhirnya ditangkap setelah sebulan bersembunyi. Perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa menimbulkan permasalahan dalam putusan nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum ini mengambil data dari perilaku dan tingkah laku melalui wawancara dan pengamatan langsung. Fokus penelitian adalah penerapan sanksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd.

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan mengubah perilaku pelaku dan menciptakan efek jera. Putusan hakim berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman 'Uqubat Ta'zir penjara selama 43 bulan, dalam putusan ini hakim merujuk pada bukti-bukti dan kesaksian yang ada di persidangan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan ini yaitu hakim melibatkan alat bukti, barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman 'Uqubat Ta'zir penjara selama 43 bulan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dan faktor-faktor yang meringankan dan memperberat hukuman bagi terdakwa.

Perlindungan terhadap korban ke depan dapat ditingkatkan oleh penegak hukum, terutama mereka yang rentan atau memiliki kelemahan seperti keterbelakangan mental. Hak-hak korban, termasuk keamanan, informasi, dan dukungan psikologis, perlu dijamin. Peran ahli dan saksi dalam peradilan, terutama pada kasus pelecehan seksual, harus ditingkatkan dengan pelatihan dan pedoman yang jelas.

*Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana, Pemerkosaan.*

## SUMMARY

**Sari Miranda**  
**180510189**

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR THE  
OFFENSE OF RAPE (Case Study of Verdict  
Number 3/JN/2022/MS.Mrd)**  
**(Muhammad Hatta, S.H., L.LM. dan Fauzah Nur Aksa,  
S.Ag., M.H.)**

*Case of rape in Aceh, particularly in Meureudu, is increasingly widespread, with minors as the primary victims. The highlighted case involves the rape of a mentally challenged woman by a pornography addict named Din Kohler. The incident occurred during the celebration of the Prophet Muhammad's birthday at Meunasah Meureudu. The perpetrator, Din Kohler, who is divorced, unleashed his deviant sexual desires on the victim. The case was reported by the victim's mother and forwarded to the police. Despite the perpetrator attempting reconciliation, the victim refused, and the perpetrator fled, becoming a Wanted Person (DPO). The perpetrator was eventually arrested after a month in hiding. Discrepancies in the statements between the victim and the accused created issues in the verdict number 3/JN/2022/MS.Mrd.*

*This study employs a qualitative approach with an empirical juridical research type. The legal research method gathers data from behavior and conduct through interviews and direct observation. The research focuses on the application of sanctions by the Meureudu Sharia Court in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, especially in the verdict Number 3/JN/2022/MS.Mrd.*

*Criminal sanctions are a form of punishment imposed by the state on perpetrators of crimes, with the aim of changing the perpetrator's behavior and creating a deterrent effect. In this case, the judge's decision is based on Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, where the defendant is sentenced to 'Uqubat Ta'zir imprisonment for 43 months. The judge referred to the evidence and testimonies presented in court. The judge's considerations in this decision involve the use of evidence, physical evidence, and elements of the criminal act, as well as aggravating and mitigating factors for the defendant. In this case, the judge imposed a 'Uqubat Ta'zir imprisonment for 43 months, taking into account the criminal elements and factors that mitigate or aggravate the punishment for the defendant.*

*Protection for victims in the future can be enhanced by law enforcement, especially for those vulnerable or with weaknesses such as mental disabilities. The rights of victims, including security, information, and psychological support, need to be ensured. The roles of experts and witnesses in legal proceedings, particularly in cases of sexual abuse, should be enhanced with clear training and guidelines.*

*Keywords: Accountability, Criminal Acts, Rape.*